

# KINERJA DINAS SOSIAL DALAM PENDISTRIBUSIAN BANTUAN PASCA BENCANA DI KABUPATEN YALIMO PROVINSI PAPUA

ARNOLD ZETH MARFIN FUSAGE

291721

*Asdaf Kabupaten Yalimo, Provinsi Papua*

*Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik*

Email: Arnoldzmf@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** The Social Service plays an important role in the welfare of the people, in this case, the Social Service acts as a distributor or distribution of aid to disaster victims based on the prevailing laws and government regulations, which is also carried out by the Social Service. tasks and functions are not optimal. **Purpose:** The purpose of this study was to determine the performance of the Social Service in the Distribution of Post-Disaster Aid in Yalimo Regency, **Method:** The method used in this study was a descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques used are interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis technique is data reduction, data presentation, and further data verification by making conclusions. This study uses the analysis of Performance theory according to Wirawan (2020) with the dimensions of work results, work behavior, and personal characteristics that are related to work. **Results:** The results of the research on the performance of the Social Service in the distribution of disaster assistance were assessed in the unsatisfactory category, using Wiranto's theory with the dimensions of Work Outcomes, Work Behavior, and Personal Traits Related to Work. The results of the percentage of the Performance of the Social Service in the distribution of disaster assistance reached 60%. In its implementation, it has obstacles such as the COVID-19 Pandemic, very large riots, lack of funds, lack of infrastructure, wide area of the region, communication networks that are not evenly distributed throughout the Yalimo Regency, lack of quality and quantity of apparatus, low public awareness regarding disasters. and the Yalimo Regency area is a disaster-prone area which has 9 potential disasters. **Conclusion:** Appraisal performance of the apparatus, which starts with the quality of work, work behavior, and personal characteristics related to work, has a value that is not maximized. As for the aspect of the apparatus' ability to solve problems, the score is not good. Based on this result, it is necessary to improve the performance of the apparatus. .

**Keywords:** Disaster Assistance, Social Service, Performance, Distribution

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Dinas Sosial berperan penting dalam mensejahterakan rakyat dalam hal ini, Dinas sosial berperan sebagai penyalur atau pendistribusian bantuan terhadap korban bencana berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku juga dilaksanakan oleh Dinas Sosial ditambah baru terbentuknya BPBD membuat pelaksanaan tugas dan fungsinya belum maksimal. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Dinas Sosial dalam Pendistribusian Bantuan Pasca Bencana di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua **Metode:** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk

teknik analisis data adalah dengan reduksi data, penyajian data, dan selanjutnya verifikasi data dengan membuat kesimpulan. Penelitian ini menggunakan analisis teori Kinerja menurut Wirawan (2020) dengan dimensi hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian kinerja Dinas Sosial dalam pendistribusian bantuan bencana dinilai dalam kategori kurang memuaskan, dengan menggunakan teori Wiranto dengan dimensi Hasil Kerja, Perilaku Kerja, dan Sifat Pribadi yang Berhubungan Dengan Pekerjaan. Diperoleh hasil persentase Kinerja Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan bencana yang mencapai 60%. Dalam pelaksanaannya memiliki hambatan seperti adanya Pandemi COVID-19, Kericuhan yang sangat besar, minimnya dana, minimnya sarana prasarana, luasnya wilayah daerah, jaringan komunikasi yang belum merata di seluruh daerah Kabupaten Yalimo, kualitas dan kuantitas aparatur yang kurang, rendahnya kepedulian masyarakat terkait bencana, serta daerah Kabupaten Yalimo merupakan daerah yang rawan bencana yang memiliki 9 potensi bencana. **Kesimpulan:** penilaian **kinerja** aparatur yang di mulai dengan kualitas hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan, memiliki nilai yang belum maksimal Adapun untuk aspek kemampuan aparatur dalam memecahkan masalah di nilai kurang baik berdasarkan hasil ini maka perlu dilakukan peningkatan kinerja aparatur.

**Kata kunci:** Bantuan Bencana, Dinas Sosial, Kinerja, Pendistribusian

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi bencana yang tinggi hal tersebut disebabkan oleh letak geografis yang berada diantara dua samudera dan dua benua serta tiga lempeng tektonik dunia ditambah dengan kondisi demografis yang memiliki laju pertumbuhan penduduk dan jumlah penduduk yang tinggi. Istilah bencana mengacu pada peristiwa berskala besar dan tidak biasa yang berdampak negatif pada kehidupan manusia dan ekosistem. Bencana adalah suatu kejadian atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan faktor alam ataupun non alam, yang mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Kabupaten Yalimo merupakan daerah yang memiliki risiko bencana dan sering terjadi bencana yang berakibat kepada masyarakat. Kabupaten Yalimo adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya pada 4 Januari 2008, Kabupaten Yalimo terdiri dari 5 distrik dan 300 kampung. Berdasarkan data BPS Provinsi Papua kondisi topografi pada umumnya banyak terdapat lereng, gunung, lembah, sedangkan permukaan agak tidak curam dan datar hanya terdapat di Distrik Elelim. Kabupaten Yalimo ialah daerah pegunungan yang mempunyai bentuk topografi datar, tidak curam, agak curam sampai sangat curam.

Bencana yang melanda Indonesia harus ditanggapi dengan serius. Korban jiwa, harta benda, kerusakan lingkungan, dan dampak psikologis semua akan terjadi jika suatu bencana terjadi baik alam, non alam, maupun sosial. Salah satu bagian dalam penanggulangan bencana yang sangat penting untuk keberhasilan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan bantuan kepada korban bencana. Bantuan dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, serta dari pihak swasta, masyarakat, dalam dan luar negeri dalam bentuk logistik dan peralatan penanggulangan bencana. Penyaluran bantuan bencana adalah sistem tujuan dan/atau penyaluran bantuan logistik dan peralatan dari titik asal ke titik tujuan dalam rangka penanggulangan bencana. Para korban yang membutuhkan harus menerima dukungan logistik dan peralatan secara tepat waktu, tepat tempat, tepat sasaran, serta jumlah dan kualitas. Pedoman pendistribusian bantuan



logistik harus disusun agar penyaluran bantuan logistik dan peralatan tersebut efektif, efisien, cepat, dan akuntabel.

Dalam penyaluran bantuan bencana tersebut seharusnya yang mempunyai tugas dan tanggungjawab adalah BPBD tetapi tidak bisa terlaksana dikarenakan BPBD baru terbentuk di awal Tahun 2020 ini sesuai dengan wawancara awal bersama asisten 3 daerah Kabupaten Yalimo. Untuk hal tersebut maka tugas dan tanggungjawab BPBD dalam penyaluran bantuan bencana diambil alih oleh Dinas Sosial. Dinas Sosial Berperan penting dalam mensejahterakan rakyat dalam hal ini, Dinas sosial berperan sebagai penyalur atau pendistribusian bantuan terhadap korban bencana berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku. Karena sesuai dengan tugas dan fungsi dinas sosial membantu urusan bupati di bidang sosial.

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Masyarakat di Kabupaten Yalimo masih sangat kurang pengetahuan mengenai tata cara penanganan bencana dan juga dampak dari bencana itu sendiri dikarenakan sosialisasi yang kurang merata dari pemerintah, Kabupaten Yalimo sendiri berada di lereng-lereng pegunungan yang membuat minimnya akses teknologi jaringan internet dan komunikasi serta akses transportasi baik masuk maupun keluar sangat susah untuk di lalui, akses transportasi yang tersedia untuk bisa sampai ke Kabupaten Yalimo biasanya hanya bisa diakses lewat dua jalur yaitu darat dan udara, tetapi seringkali terkendala karena kerusakan jalan yang membuat akses jalan terhambat sehingga satu-satunya cara yaitu melalui transportasi udara yang hanya melayani setiap 3 kali penerbangan dalam satu minggu itu pun hanya menggunakan transportasi udara dalam hal ini (pesawat) yang hanya bisa mengangkut maksimal 8 sampai 12 orang, selain itu ada juga masalah yang dihadapi oleh pemerintah yaitu kurangnya Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat karena masyarakat setempat masih menanamkan prinsip-prinsip atau ego kedaerahan setempat sehingga kebijakan yang diambil oleh dinas sosial dalam pendistribusian bantuan bencana terkadang tidak langsung bisa diterima begitu saja atau direspon baik oleh masyarakat. Adapun masalah yang dialami oleh dinas sosial dalam pendistribusian bantuan bencana yaitu pendataan distribusi bantuan masih secara manual.

Sesuai dengan data dan informasi yang penulis peroleh bahwa di Kabupaten Yalimo dalam hal ini badan yang menangani di bidang bencana yaitu BPBD Kabupaten Yalimo, kinerjanya belum maksimal karena baru terbentuk awal tahun 2020 sehingga data yang bisa diperoleh terkait masalah pendistribusian bantuan bencana sampai saat ini belum maksimal atau tugas dan fungsi belum berjalan dengan baik, oleh karena sesuai dengan data wawancara awal bahwa Dinas Sosial Kabupaten Yalimo sebagai fokus utama dalam penulisan ini, karena sebelum terbentuknya BPBD Kabupaten Yalimo Dinas sosial yang melaksanakan tugas dan fungsi BPBD dalam penyaluran bantuan kepada daerah-daerah pasca bencana sehingga data yang diperlukan cukup maksimal bagi penulis untuk memperolehnya. Banyaknya jenis dan jumlah data yang berbeda yang harus diproses, serta proses rekapitulasi data manusia, dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk, termasuk penundaan dan kesalahan. Ketidaktepatan dalam pendistribusian bantuan karena kesalahan analisis data merupakan contoh kesalahan pengambilan keputusan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah tidak adanya informasi tentang keadaan jalur transportasi, yang menyebabkan keterlambatan distribusi bantuan ke lokasi pengungsian korban bencana dan menyebabkan distribusi bantuan menjadi tidak merata.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks penyaluran bantuan. Penelitian Ary setyadi dan Robby Rachmatullah (2014) yang berjudul Implementasi sistem

manajemen pengetahuan untuk distribusi bantuan Logistik korban bencana alam menghasilkan bahwa sistem yg dapat memberikan informasi atau keputusan dalam menentukan jenis dan jumlah kebutuhan logistik korban pasca bencana (Setyadi&Rahmatullah : 2014). Penelitian Nasrullah, Eko Teguh Paripurno dan Jugan Danu Prasetyo (2017) yang berjudul Pengelolaan Bantuan Logistik Bencana Banjir studi kasus Tanggap Darurat Bencana di Kota Kendari menghasilkan pengelolaan bantuan logistik bagi korban bencana pada saat tanggap darurat di Kota Kendari tahun 2017 mengacu pada perka BNPB Nomor 13 tahun 2008 tentang pedoman Manajemen logistik dan peralatan penanggulangan Bencana Distribusi Kepada masyarakat dilaksanakan ketika instansi penyalur memiliki stok bantuan sesuai kebutuhan korban terdampak, Titik-titik pendistribusian ditentukan berdasarkan perencanaan operasi yang didukung oleh Lembaga yang terlibat dalam Klaster logistik (Nasrullah, Paripurno, & Prasetyo ; 2017). Penelitian Arief Ivana Putra dan Zikri Alhadi S.IP, M.A (2019) yang berjudul Analisis Kinerja Dinas Sosial Kota Padang Dalam Penanggulangan Bencana Di Kota Padang (Putra & Alhadi : 2019) menemukan bahwa inisiatif kinerja dinas sosial cukup baik Hal tersebut dibuktikan dengan adanya relasi antara dinas sosial dengan para donator maupun CSR yang mau bekerjasama untuk membantu dinas sosial dalam pendanaan guna pemenuhan kebutuhan bufealstock (Putra & Alhadi : 2019)

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni Kinerja Dinas Sosial dalam pendistribusian bantuan pasca bencana di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua dengan penelitian Setyadi, Rahmatullah, Nasrullah, Paripurno, Prasetyo, Putra & Alhadi dkk. Selain itu penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan pendekatan induktif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan analisis teori Kinerja menurut Wirawan (2020) dengan dimensi hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan..

#### **1.5. Tujuan.**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Kinerja Dinas Sosial dalam Pendistribusian Bantuan Pasca Bencana di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua

### **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan pendekatan induktif dan menganalisis data melalui reduksi data, data display/ penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (Conclusion Drawing atau Verification). Data diperoleh dengan teknik Tringualasi data yaitu menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data wawancara dengan teknik purposive sampling terhadap 8 informan yaitu Kepala Dinas Sosial , Sekdis, Kasubah Penyusunan Program, Kasi Bina Bantuan Sosial, Kasi Pelayanan Bina Mental, Kepala bantuan sosial danjajarannya serta masyarakat penerima bantuan. Penelitian ini menggunakan analisis teori Kinerja menurut Wirawan (2020) dengan dimensi hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Kinerja Dinas Sosial dalam pendistribusian bantuan pasca bencana di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua menggunakan analisis teori pengukuran/indikator yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan analisis teori Kinerja



menurut Wirawan (2020) dengan dimensi hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang ada hubungannya dengan pekerjaan. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

### **3.1. Hasil Kerja**

Dimensi kinerja ialah unsur dalam pekerjaan yang menunjukkan suatu. Untuk mengukur kinerja, dimensi-dimensi kinerja dikembangkan menjadi indikator kinerja. Indikator kinerja dipakai guna pengembangan instrumen evaluasi kinerja yang kemudian digunakan untuk mengukur kinerja organisasi.

- a) Kualitas Kerja, kualitas kerja pegawai yang dilaksanakan masih kurang dikarenakan terkendala akibat kericuhan yang terjadi di daerah pasca pilkada yang membuat menurunnya kualitas kerja dari pegawai yang juga merasa cemas dan juga tanggapan dari masyarakat.
- b) Kecepatan dan ketepatan waktu, hasil dari kecepatan dan ketepatan kerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Yalimo saat ini bisa dikatakan belum terlalu maksimal dikarenakan berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas, luas wilayah Kabupaten Yalimo serta Keterbatasan sarana dan prasarana, Kemudian rusaknya jalan menjadi satu hambatan dalam pelaksanaan tugas.
- c) Efisiensi penggunaan sumber, minimnya sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja Dinas Sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, di mana jumlah sarana prasarana yang rusak berjumlah 8 unit, lebih banyak dibandingkan pada sarana prasarana yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa minimnya sarana prasarana mempengaruhi Efisiensi penggunaan sumber Dinas Sosial, sehingga kurang maksimalnya kinerja pegawai dalam setiap pelaksanaannya yang dapat mempengaruhi kinerja Organisasi.

### **3.2 Perilaku Kerja**

Perilaku kerja merupakan sikap dan tindakan yang ditujukan oleh orang-orang yang bekerja dalam suatu organisasi, suatu organisasi terbilang baik jika orang-orang yang bekerja dalam organisasi mempunyai perilaku kerja yang baik. Keberhasilan suatu organisasi ditentukan oleh perilaku karyawan atau pegawai, sebagian orang menyebut perilaku kerja ini sebagai motivasi, kebiasaan, dan budaya kerja.

- a) Perilaku yang diisyaratkan oleh peraturan organisasi, perilaku yang diisyaratkan dalam organisasi sudah cukup baik namun masih adanya kekurangan seperti yang disampaikan anggota Dinas Sosial Kabupaten Yalimo bahwa dalam hal menanggapi tugas sudah cukup baik namun dalam pengerjaannya saja yang masih terlambat, sehingga perlu adanya tanggapan dari pimpinan mengenai kapasitas kinerja.
- b) Disiplin kerja, memang kondisi Kabupaten Yalimo sekarang masih belum dapat terbilang baik pasca kericuhan segala hal dalam bidang perkantoran belum bisa berjalan sehingga penulis mendapatkan data dengan melaksanakan wawancara di kediaman masing-masing pegawai Dinas Sosial Kabupaten Yalimo.
- c) Kerjasama, relasi dan kerja sama dari Dinas Sosial sudah berjalan dengan baik, namun memang sebaiknya dilakukan pertemuan atau rapat rutin secara bersama oleh instansi terkait agar penanggulangan bencana dapat terwujud lebih cepat dan sesuai yang diharapkan.
- d) Kepemimpinan dalam tim kerja, Kepemimpinan dalam tim kerja dapat diketahui bahwa sudah cukup baik, dimana pegawai dan pimpinan masih aktif dalam bertukar Pemberian ide/gagasan, Dukungan dan Kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial dalam mempererat kerjasama antar tim kerja sudah cukup baik dengan adanya

pengawasan maupun reward tertentu yang membuat kinerja dari pegawai maupun tim kerja semakin meningkat.

- e) Pemanfaatan waktu, hasil dari pemanfaatan waktu aparatur Dinas Sosial Kabupaten Yalimo kurang baik dikarenakan faktor kondisi keadaan di Kabupaten yang masih rawan akan kericuhan.

### **3.3. Sifat Pribadi Yang Berhubungan dengan pekerjaan**

Sifat pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan adalah sifat dan perilaku seseorang dalam melaksanakan pekerjaan.

Integritas

- a) Kemampuan aparatur dinas sosial Kabupaten Yalimo dalam memenuhi target pekerjaan. aparatur tetap aktif dan berupaya dalam penanganan bencana yaitu pendistribusian bantuan, seperti yang tertera pada catatan pendistribusian dana bantuan bencana kericuhan. kemampuan aparatur Dinas Sosial dalam memenuhi target dapat dikatakan belum cukup baik atau kurang maksimal karena terbatasnya anggaran, sarana prasarana yang tidak lengkap dan rusak sehingga mempengaruhi kemampuan aparatur dalam memberikan pelayanan pendistribusian bantuan bencana
- b) Kemampuan Aparatur dalam memecahkan Masalah. kemampuan aparat Dinas Sosial dalam memecahkan persoalan dan permasalahan di tengah pandemi maupun kericuhan masih kurang dan dalam penanganannya kurang maksimal dikarenakan bencana sosial merupakan bencana yang memakan banyak korban dan sulit di kendalikan, kemudian hal ini juga di dukung dengankemudian kualitas SDM dari Dinas Sosial yang masih kurang.
- c) Kemampuan beradaptasi, aparatur Dinas Sosial dalam hal beradaptasi kurang baik dikarenakan masih banyak kendala seperti kondisi di daerah yang belum kondusif sehingga aparatur Dinas Sosial belum berani untuk melakukan aktifitas perkantoran karena merasa terancam.

### **3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dinas Sosial Kabupaten Yalimo Provinsi Papua telah banyak melakukan upaya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di tengah kasus Covid-19 dan juga Kericuhan di Kabupaten Yalimo sistem yg dapat memberikan informasi atau keputusan dalam menentukan jenis dan jumlah kebutuhan logistik korban pasca bencana sudah berjalan dengan baik seperti yang ditemukan Penelitian Ary setyadi dan Robby Rachmatullah (2014). Namun penyaluran bantuan tidak mengikuti perka BNPB Nomor 13 tahun 2008 tentang pedoman Manajemen logistik dan peralatan penanggulangan Bencana (Nasrullah, Paripurno, & Prasetyo ; 2017) karena pada dasarnya Dinas Sosial berpatokan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.

Dalam pelaksanaannya memiliki hambatan seperti adanya minimnya dana khususnya di bidang bantuan bencana, Lemahnya kesadaran dan sifat kedaerahan dari masyarakat yang gampang di hasut isu hoax, sara dan agama yang menyebabkan sering terjadinya kericuhan di Kabupaten Yalimo yang menyebabkan rusaknya segala fasilitas pemerintah dan juga korban jiwa maupun materi yang sangat besar menyebabkan lumpuh nya kegiatan perekonomian, sarana transportasi baik itu keluar maupun masuk ke Kabupaten Yalimo. Hambatan selanjutnya adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Hambatan juga terjadi disebabkan luasnya wilayah Kabupaten Yalimo dan jaringan komunikasi karena engalami kesulitan seperti jalan yang sulit di tempuh, dan ada terdapat daerah yang tidak dapat ditempuh dengan jalur darat di beberapa desa di Kabupaten Yalimo, tetapi



harus di tempuh dengan jalur udara. Kurangnya kedisiplinan aparaturnya dinas sosial dalam bekerja juga menjadi penghambat, kondisi daerah Kabupaten Yalimo yang merupakan daerah rawan bencana banjir, gempa bumi, longsor, kebakaran, wabah penyakit, dan konflik sosial. Kabupaten Yalimo saat ini sedang mengalami bencana sosial yaitu kerucuhan pasca pilkada 2021 yang menyebabkan kerugian 160 bangunan, Pembakaran 119 kendaraan, 34 kantor pemerintah, 126 ruko, dan total kerugian sekitar 400 miliar. Ini di sebabkan karena masyarakat mudah terhasut akan isu hoax yang beredar.

Dinas Sosial Kabupaten Yalimo Provinsi Papua telah banyak melakukan upaya dan usaha dalam menanggapi bencana dan pendistribusian bantuan bencana di daerah. Namun dirasa belum cukup sehingga perlu di optimalkan dengan penyesuaian diri dengan bekerja di tengah pandemi, Keadaan dan situasi di Kabupaten, serta strategi, pemikiran atau ide yang inovatif guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Yalimo Provinsi Papua seperti perencanaan dan penyediaan *call center* dan pemberian sanksi yang tegas pada pegawai yang tidak melaksanakan kewajiban dan tugas dengan baik. Dinas sosial juga melakukan kerjasama dengan membentuk tim siaga bencana yang terdiri dari TNI/POLRI, LSM, dan dinas-dinas terkait yang berhubungan dengan penyelesaian masalah dan meningkatkan Sosialisasi dan penyuluhan tentang kepedulian akan Sesama dan menghilangkan sifat anarkis dan mudah terprovokasi. Namun Dinas Sosial tidak melakukan kerjasama dengan para donator maupun CSR yang mau bekerjasama untuk membantu dinas sosial dalam pendanaan guna pemenuhan kebutuhan bufealstock (Putra & Alhadi : 2019).

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Kinerja Aparatur pada Dinas Sosial Kabupaten Yalimo Provinsi Papua berdasarkan pada hasil analisis observasi, dokumentasi, dan wawancara penulis, dengan menggunakan 3 aspek penilaian kinerja aparaturnya yang di mulai dengan kualitas hasil kerja, perilaku kerja, dan sifat pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan, memiliki nilai yang belum maksimal Adapun untuk aspek kemampuan aparaturnya dalam memecahkan masalah di nilai kurang baik. Dalam pendistribusian bantuan terdapat beberapa hambatan yaitu minimnya dana yang dimiliki, sifat perilaku dan kebiasaan masyarakat yang kurang mendukung, keterbatasan sarana dan prasarana, luasnya wilayah dan jaringan komunikasi yang sulit, kurangnya kedisiplinan aparaturnya dinas sosial dalam bekerja, dan banyaknya potensi bencana di daerah Kabupaten Yalimo. Kemudian upaya yang dilakukan dinas sosial optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatkan sikap dan perilaku masyarakat, penyelenggaraan dalam pelayanan kepada masyarakat, dan meningkatkan kualitas pendidikan Sumber daya Aparatur dan Kedisiplinan Aparatur Dinas Sosial Kabupaten Yalimo Provinsi Papua dengan penyediaan *call center* (tanggap bencana) dan pemberian sanksi bagi pegawai yang tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Guna meningkatkan pelaksanaan penyaluran bantuan disarankan untuk meningkatkan kualitas pendidikan Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan formal serta melakukan pengawasan dengan lebih ketat menggunakan *fingerprnt* dan laporan berbasis online, kemudian disarankan untuk pengajuan penambahan sarana dan prasarana serta melaksanakan program pembinaan SDM secara berkesinambungan disertai monitoring dan evaluasi program kinerja seluruh pegawai, khususnya pegawai yang belum mampu menghasilkan kinerja yang baik.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga memiliki keterbatasan tidak dapat melakukan observasi secara langsung penyaluran bantuan serta masih terjadinya konflik masyarakat pasca pemilu yang menyebabkan kondisi lapangan masih belum kondusif sepenuhnya.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi dan

pembahasan serupa berkaitan kinerja Dinas Sosial dalam pendistribusian bantuan pasca bencana di Kabupaten Yalimo Provinsi Papua.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Yalimo dan jajarannya serta seluruh masyarakat yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## **VI. DAFTAR PUSTAKA**

- Paripurno, N. E. T., & Prasetyo, J. D. (2021). Pengelolaan bantuan logistik bencana banjir : studi kasus tanggap darurat bencana di kota kendari tahun 2017. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(07), 25–38.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- Peraturan Gubernur Papua Nomor 35 Tahun 2015 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Dan Pemukiman Provinsi Papua
- Putra, A. I., & Alhadi, Z. (2019). Analisis Kinerja Dinas Sosial Kota Padang Dalam Penanggulangan Bencana Di Kota Padang (Suatu Studi Manajemen Kebencanaan). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1),
- Setyadi, A., & Rachmatullah, R. (2014). Implementasi Sistem Manajemen Pengetahuan Untuk Distribusi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam. *Jurnal Ilmiah Go Infotech*, 20(2). <https://doi.org/10.36309/goi.v20i2.10>
- Wirawan. (2020). Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia.

